GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**: Suara Pembaruan**	**Tgl/Bln/Thn**	**: 13 November 2007**
Subyek	**: Kehutanan**	**Hari**	**: Selasa**
		Halaman	**: 12**

Perubahan Status Hutan Harus Diperketat

[PONTIANAK] Untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya hutan di Kalimantan Barat (Kalbar), perubahan status dan peruntukan lahan harus diperketat. Pemerintah Daerah (Pemda) harus membuat program pemanfaatan hutan lindung untuk peningkatan ekonomi dengan melibatkan warga.

Hal itu dikatakan Dekan Fakultas Kehutanan Universiats Tanjungpura, Pontianak, Dr Herujono kepada *SP*, di Pontianak, Senin (12/11).

Jika perubahan status hutan, khususnya dari hutan produksi menjadi peruntukan pertanian lahan kering atau perkebunan, dipermudah maka tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat hutan di Kalbar akan habis. Oleh sebab itu, permohonan perubahan status hutan menjadi peruntukan lain harus diperketat, katanya.

Dengan demikian, tambahnya, hutan di Kalbar akan dapat dipertahankan dan selanjutnya masalah kerusakan lingkungan akan dapat diatasi sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal pemanfaatan hutan, hendaknya dilaksanakan sesuai dengan peraturan.

Membuat Program

Dikatakan, Pemda harus membuat program pemanfaatan hutan untuk peningkatan ekonomi, tanpa merusak hutan. Artinya, dalam rangka peningkatan perekonomian, hutan dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata, tempat penangkaran binatang dan jenis pohon langka. Itu harus ditata dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal pemanfaatan hutan, hendaknya dapat melibatkan warga yang tinggal di sekitar hutan.

Dengan begitu, tambahnya, mereka akan merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk melestarikan hutan. Jika masyarakat sudah dilibatkan dalam memanfaatkan hutan, kecil kemungkinan mereka menebang atau merusak hutan. [146]

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP